

PERTARUNGAN SIMBOL IDENTITAS ETNIS SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PILKADA KOTA MAKASSAR

Symbol Connection Of Ethnic Identity As Political Communication In Election, Makassar City

Edy Junaedy Syaf

Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin. edyjunaedys@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui praktik simbolisasi identitas etnik dalam media komunikasi politik dalam pemilihan walikota Makassar pada tahun 2013 dan (2) menemukan model komunikasi politik wacana yang dilakukan oleh Ramdhan Pomanto dalam melawan simbol identitas etnik dalam pemilihan walikota Makassar pada tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi media. Informasi didapatkan dari berbagai sumber yang dianggap aktif dan terlibat langsung dalam pemilihan walikota Makassar pada tahun 2013. Dalam gelaran pemilihan walikota Makassar pada tahun 2013, intensitas praktik penggunaan simbol identitas etnik pada media cukup tinggi. Praktik ini sengaja dilakukan untuk menyerang salah satu calon Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto. Simbol etnik yang digunakan diterbitkan dalam format Iklan pada berbagai media di Kota Makassar. Menggunakan pandangan Giorgio Agamben, praktik ini merupakan Pembangunan relasi dalam kekuasaan yang dirumuskan dengan kehadiran biopolitik. Biopolitik merupakan unsur intrinsik dalam analisa mengenai kedaulatan (*sovereignty*) dan peran yang dimilikinya dalam mengatur apa yang mengkonstitusikan sebuah keadaan pengecualian (*state of exception*). Pada akhirnya, Ramdhan Pomanto menggunakan politik wacana sebagai alat merebut kepentingan kekuasaan serta melawan dominasi politik etnik. Distribusi wacana ke tengah masyarakat dilaksanakan secara strategis melalui media, baik itu media cetak maupun elektronik.

Kata Kunci: Politik Identitas, Simbol, Politik Wacana, Pilkada Makassar

ABSTRACT

The objectives of this research are: (1) to know the practice of symbolization of ethnic identity in political communication media in Makassar mayoral election in 2013 and (2) to find political discourse communication model by Ramdhan Pomanto in opposing ethnic identity symbol in Makassar mayoral election in 2013. This research is a qualitative descriptive research. Data obtained through observation, interview and media documentation. Information is obtained from various sources deemed active and directly involved in the selection of Makassar mayor in 2013. In Makassar Makassar mayoral election in 2013, the intensity of the practice of using ethnic identity symbols on the media is quite high. This practice is intentionally done to attack one of the candidates of Makassar Mayor, Ramdhan Pomanto. The ethnic symbol used is published in the Ad format on various media in Makassar City. Using Giorgio Agamben's view, this practice is the building of relations in power formulated by the presence of biopolitics. Biopolitics is an intrinsic element in the analysis of sovereignty and its role in governing what constitutes a state of exception. In the end, Ramdhan Pomanto uses discourse politics as a means of seizing power and opposing ethnic political domination. Distribution of discourse into the middle of society carried out strategically through the media, both print and electronic media.

Keywords: Identity Politics, Symbols, Politics of Discourse, Pilkada Makassar

PENDAHULUAN

Masih Segar diingatan masyarakat Indonesia bagaimana pertarungan pilkada Jakarta. Bukan hanya karena Pilkada ini merupakan yang terbesar di Indonesia, tetapi dibalik gempita demokrasi, pilkada Ibukota ternyata menyisakan banyak persoalan kebangsaan. Bagaimana tidak, pertarungan tiga pasangan calon gubernur hampir saja merusak tatanan persatuan dan kesatuan bangsa. Isu ras dan agama yang selama ini dijaga agar tetap stabil, dijadikan senjata utama memenangkan pertarungan politik. Pada akhirnya, pergolakan isu perbedaan tersebut tak kunjung reda hingga hari ini.

Sebagai ibukota Negara, Jakarta dihuni oleh kelompok masyarakat yang Heterogen. Tidak kurang dari tujuh juta orang dari berbagai suku dan ras menjadi penduduk sekaligus masuk sebagai DPT (daftar pemilih tetap). Keragaman inilah yang terus dijaga di Ibukota (dan kota-kota besar lainnya) agar pluralisme (kebinnekaan) menjadi kekuatan untuk membangun Negeri. Namun, sekali lagi pilkada Jakarta menampik pemahaman Theda Skocpol dan Kenneth Finegold dalam buku *Political Science Quarterly* (1982) bahwa Pluralisme adalah konsepsi politik yang “secara sosial determinis” (socially determinist).

Pertarungan politik Jakarta justru menjauhkan diri pada konsep Pluralisme. Perbedaan suku, ras dan agama mengantar Anis Baswedan menjadi Gubernur terpilih pasca putaran kedua. Kesamaan etnik menjadi wajan besar untuk mendulang suara guna menelakung keberhasilan program pembangunan Jakarta yang digaungkan pasangan petahana. Kemenangan seperti ini menjadi lumrah mengingat berbagai pilkada kota Besar Indonesia dimenangkan dengan mengedepankan strategi politik Identitas.

Penolakan Jakarta atas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukanlah hal baru. Bila melihat kembali kebelakang, berbagai kasus menunjukkan ancaman akan keragaman identitas yang seharusnya merupakan perekat bangsa. Peristiwa pertikaian etnik Dayak-Madura tahun 2001, kekerasan politik pada bulan Mei 1998 yang menyerang etnis Cina atau peristiwa Ambon yang memiliki beberapa seri kerusuhan. Semuanya menjadi cerminan bahwa identitas

etnik menjadi hal penting untuk pergerakan yang sifatnya massif.

Mengutip pernyataan Samuel Phillips Huntington bahwa politik global akan ditandai oleh kebangkitan *politics of civilization*, politik domestik akan memunculkan apa yang disebutnya kebangkitan *politics of ethnicity*. Huntington menekankan bahwa kebangkitan politik etnik akan sangat dirasakan oleh ‘negara yang terdiri dari keragaman bangsa’, perbedaan etnis dan ras, akan menjadi sumber konflik baru dalam tubuh Negara.

Lengsernya rezim sentralistik Orde baru (1998) menjadi penanda kebangkitan politik identitas. Babak demokrasi baru dimulai dengan diperkenalkannya sistem Otonomi Daerah. Sistem desentralisasi ini membuka ruang yang luas untuk menentukan pemimpin di masing-masing daerah. Para “raja” kecil di daerah mengambil peran yang besar dalam menentukan nasib “kaumnya”.

Fenomena politik Ibukota inilah yang kemudian membawa penulis kembali ke pertarungan “para gajah” pada pilkada Kota Makassar akhir 2013 silam. Nuansa hadirnya gerakan politik identitas etnik ini, ditunjukkan dengan berbagai leaflet, iklan politik koran lokal dan media sosial yang secara terbuka berusaha memaksa kuasa identitas etnik di tengah pemilih kota Makassar.

Dikotomi oposisional seperti yang terlihat melalui bahasa politik, ‘Kami yang asli’ dan ‘Dia yang pendatang’, ‘Kami 100 % Makassar, sedangkan dia adalah 100% Gorontalo’, ‘Kami adalah putra daerah, Dia bukan’, serta ‘Kami yang harusnya ikut pemilihan walikota, Dia warga naturalisasi tidak boleh’, sangat menonjol dalam ruang publik warga Makassar.

Propaganda simbol identitas saat itu semakin hari semakin kuat seiring dengan konstalasi perpolitikan yang kian memanas. Isu etnik mencapai puncaknya pasca penetapan resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Makassar atas sepuluh calon walikota dan wakil walikota Makassar.

Menjelang hari pemilihan Walikota Makassar, tepatnya pada tanggal 18 September 2013, kampanye negatif mulai marak. Propaganda dengan memanfaatkan atribut politik berupa leaflet disebar ke hampir seluruh wilayah

pemukiman warga Kota Makassar. Isinya beragam, tetapi yang mencolok adalah konten selebaran yang menegaskan status oposisional siapa “asli Makassar” dan siapa yang pendatang.

Serangan atas identitas etnik ini, utamanya ditujukan kepada salah satu figur calon walikota Makassar yakni Ir. Ramdhan Pomanto yang dipandang tidak merepersentasikan bagian dari etnik Bugis-Makassar ataupun Toraja-Mandar, sebagai etnik yang mayoritas dari komposisi latar belakang etnik penduduk kota Makassar.

Ramdhan Pomanto atau yang lebih dikenal sebagai Danny Pomanto memang tidak memiliki latar belakang, sejarah asal usul yang berdarah Makassar atau Bugis. Ayahnya, Buluku Pomanto berasal dari kabupaten Gorontalo Utara demikian pula ibunya. Latar belakang perbedaan sejarah asal usul inilah yang dijadikan dasar oleh sekelompok elit politik untuk menonjolkan sentimen etnik, menyerang Ramdhan Pomanto yang dipandang tidak memiliki sejarah asal usul dari Sulawesi Selatan.

Terdapat 10 (sepuluh) pasangan calon walikota dan wakil walikota merupakan bagian dari representasi elit politik yang selama ini memiliki kuasa politik yang cukup berpengaruh di kota Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan secara nasional. Di antaranya, Irman Yasin Limpo, yang merupakan adik kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Apiyati Amin Syam yang merupakan istri dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan yakni H. Amin Syam, serta Kadir Halid yang merupakan adik kandung dari politisi senior Golkar yakni Nurdin Halid.

Keterlibatan hampir seluruh klan Politik yang selama ini mendominasi kepemimpinan di Sulawesi Selatan memunculkan sebuah istilah bahwa pemilihan walikota Makassar adalah pertarungan ‘para gajah’. Hampir seluruh kekuatan politik turun gunung guna memperebutkan kursi 01 (kosong-satu). Mereka yang memiliki “trah” politik tak ingin tinggal diam dan beramai-ramai mendaftarkan diri di kantor KPUD Kota Makasar.

Menariknya adalah, kemunculan Ramdhan Pomanto sebagai calon walikota. Tidak banyak yang menyangka, Ramdhan Pomanto yang bukan berlatar belakang seorang politisi, tidak mewakili trah dan klan politik di

kota Makassar maupun Sulawesi Selatan, serta memang bukan berasal dari etnik mayoritas Bugis - Makassar atau Mandar - Toraja, akhirnya muncul menjadi calon walikota dengan Partai Demokrat sebagai kendaraan Politikanya.

Berdasarkan sudut pandang etnisitas ini, maka wajar jika muncul pertanyaan mendasar, apa yang membuat Ramdhan Pomanto yakin bertarung di Pilkada Makassar? Terlebih persentasi etnik Gorontalo sendiri hanya mencapai 1,2 % dari keseluruhan penduduk kota Makassar.

PERSPEKTIF TEORITIK DALAM PENELITIAN

Bahasa merupakan nafas utama dari komunikasi. Bahasa merupakan rangkaian simbol baik itu verbal maupun nonverbal. Bahasa bisa pula dituangkan dalam bentuk tekstual maupun kontekstual. Salah satu pendekatan paling awal terhadap studi Bahasa dikemukakan oleh Ferdinand De Saussure. Baginya, bahasa sebagai ciri pembeda yang sangat menonjol, karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai satu kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lainnya.

Saussure kemudian membagi bahasa kedalam ‘langue’ dan ‘parole’. ‘langue’ sebagai suatu sistem atau aturan yang lebih dahulu ada sebelum penggunaan bahasa, yang memiliki kesamaan penggunaan, untuk seluruh komponen komunitas bahasa, dan merupakan sisi sosial dari bahasa yang juga sebagai lawan dari ‘parole’, yang bersifat individual. Bagi Saussure, ‘parole’, baik lisan maupun tulisan, ditentukan sepenuhnya oleh pilihan masing-masing individu, bukan oleh pranata sosial. Lebih lanjut, linguistik, menurut Saussure, berkaitan lebih dengan ‘langue’, bukan ‘parole’

kritik tajam atas pemikiran ini dilayangkan oleh Pierre Bourdieu. filsuf perancis ini menyebut bahwa linguistik struktural terjebak dalam apa yang disebutnya “ilusi linguistik”, yaitu pandangan bahwa kemampuan berbahasa terbagi secara merata dan sama persis pada semua individu dalam sebuah masyarakat penutur. Padahal dalam kenyataannya, kemampuan berbahasa tidak pernah terdistribusi secara merata antar-individu (Bourdieu dalam Wacquant 1989: 47).

Di sisi lain, linguistik struktural memprioritaskan analisis langue yang abstrak dan dengan demikian mengabaikan penggunaan bahasa secara konkret sebagai sarana perebutan dan penggunaan kekuasaan. Menurut Bourdieu, yang beredar dalam pertukaran linguistik bukanlah semata “bahasa” murni dalam arti langue, melainkan praktik berbahasa atau diskursus yang secara sosial ditandai, baik dalam produksi maupun dalam resepsinya.

Seperti pada wilayah-wilayah kajian lain, Bourdieu menganalisis bahasa menggunakan tiga konsep dasarnya: **habitus, ranah, dan modal**. Sebuah praktik berbahasa atau diskursus dihasilkan oleh habitus, tepatnya habitus bahasa, yaitu disposisi-disposisi untuk menghasilkan, memahami, menilai, dan menggunakan bahasa secara tepat dalam berbagai kondisi. Jika diurai lebih rinci habitus bahasa meliputi kemampuan untuk menghasilkan sekaligus menilai bahasa, dialek, gaya bahasa, diksi, gaya pengucapan, intonasi, logat, aksen, mimik tertentu dan sebagainya. Singkatnya cara menggunakan tubuh dalam berbahasa.

Habitus bahasa diperoleh dengan menginternalisasi struktur dunia sosial objektif di mana ia hidup, dan karenanya bervariasi bergantung pada kondisi pembentukannya. Misalnya seseorang yang tumbuh akrab dengan buku, majalah, dan bahan bacaan yang dianggap “bermutu” akan memiliki kosakata yang kaya, cara berpikir teratur, wawasan yang luas, dan kemampuan mencari dan menemukan sumber pengetahuan yang dibutuhkannya (Rusdiarti 2003: 35). Sudah tentu lingkungan semacam ini tidak terdistribusi secara merata untuk setiap individu karena membutuhkan investasi berupa waktu dan modal ekonomi seseorang maupun orang tuanya.

Contoh lain yang lebih permukaan dan bisa dengan mudah dipahami adalah kemampuan berbahasa tertentu. Bagi kita di Indonesia, sangat jelas betapa kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris terdistribusi secara sangat timpang. Bahkan kemampuan berbahasa Indonesia yang resminya harus dikuasai oleh seluruh penduduk juga tidak terbagi secara sama.

Terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan seseorang memperoleh disposisi itu dalam habitusnya, dan kondisi itulah yang

tidak tersebar merata. Karena berkaitan dengan kondisi pemerolehan yang berbeda, maka tiap disposisi linguistik yang berbeda mendapatkan nilai yang berbeda pula. Bahasa, aksen, dan intonasi yang berbeda akan dinilai secara berbeda. Melalui habitus, perbedaan kondisi sosial diterjemahkan ke dalam perbedaan praktik bahasa. Dengan demikian ada disposisi linguistik tertentu yang dihargai, artinya menjadi modal, dalam ranah-ranah tertentu.

Meski begitu, perbedaan antara disposisi linguistik dan disposisi-disposisi lainnya tidak boleh dilebih-lebihkan. Disposisi linguistik hanya satu dari berbagai disposisi yang menyatu dalam habitus individu dan saling menguatkan satu sama lain dalam perjuangan akumulasi modal (Bourdieu 1995a: 89). Juga harus segera ditambahkan bahwa praktik bahasa tidak pernah terjadi di ruang kosong, melainkan dalam sebuah ranah.

Sebuah ucapan hanya mendapat arti dan nilainya dalam sebuah ranah. Dengan menggunakan analogi ekonomi, Bourdieu menyebut ruang terjadinya pertukaran bahasa sebagai “pasar bahasa” yang ditandai oleh “hukum pembentukan harga”, yaitu skema implisit yang menentukan bahasa apa, dengan gaya apa, dan cara penyampaian macam apa, yang bernilai dalam setiap ranah (Bourdieu 1995a: 69).

Sangat jelas bahwa aturan pembentukan harga bervariasi dari satu ranah ke ranah lain. Dalam sebuah seminar filsafat atau sebuah skripsi filsafat, misalnya, yang dihargai adalah kalimat-kalimat berbahasa Indonesia yang teratur, argumentatif, penuh nama-nama filsuf, dan dibumbui jargon-jargon filosofis berbahasa Yunani atau Latin di sana-sini. Sementara dalam sebuah ceramah keagamaan Islam yang lebih dihargai adalah kalimat-kalimat yang banyak mengutip hadits Nabi, ayat al-Qur’an, atau istilah-istilah berbahasa Arab.

Sebuah ucapan, baik isi maupun bentuknya, adalah hasil kompromi antara kepentingan ekspresif, yakni sesuatu yang hendak diungkapkan, dan sensor yang inheren dalam ranah di mana ia hendak diungkapkan. Di sini, sensor adalah sensor-diri dan tidak boleh dimaknai sebagai pelarangan eksplisit melalui kekuatan koersif dari luar layaknya sensor film atau sensor media. Pun sensor-diri tidak

dipahami sebagai pembatasan secara sadar oleh individu terhadap dirinya layaknya sensor wartawan atau redaktur terhadap isi medianya karena pertimbangan keamanan atau pangsa pembaca.

Sensor-diri ini terjadi melalui habitus, dan dengan demikian tidak dikenali sebagai sensor, melainkan sebagai satu-satunya cara berbicara yang benar. Tiap individu melalui habitusnya memiliki pengetahuan praktis mengenai aturan yang akan menentukan nilai ucapannya dalam ranah tertentu, dan dengan demikian ia memiliki keterampilan praktis untuk mengantisipasi keuntungan material atau simbolik yang akan diterimanya melalui ucapan tertentu.

Antisipasi keuntungan inilah yang menerapkan sensor terhadap ucapan yang akan dihasilkan agen. Sejauh dimungkinkan disposisinya, seorang agen tidak akan menghasilkan ucapan yang dinilai rendah, atau mengancam keuntungannya sendiri, dalam sebuah ranah.

Selain habitus sebagai sumber legitimasi, Bourdieu secara sosiologis kemudian menguraikan gagasan tentang *doxa*. Dalam bukunya Michael Grenfell (ed.), *Pierre Bourdieu; Key Concepts*, (UK: Acumen, 2008) *Doxa* merupakan konsep yang diadopsi dari Edmund Husserl yang digunakan oleh Bourdieu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan praktik dan tindakan alami dalam masyarakat tradisional. *Doxa* merupakan hubungan kepatuhan langsung yang dibentuk dalam praktik antara habitus dan arena (ranah) yang berkesesuaian, dan merupakan sesuatu yang diterima begitu saja dari dunia yang mengalir dari pikiran (Bourdieu, 1990a:68). Kesesuaian habitus dengan logika arena (*logic of field*) dikarenakan oleh kehadiran *doxa* – *the unwritten rule of the game* - yang mendasari praktik-praktik di dalam ranah.

Doxa terdiri dari seperangkat kepercayaan yang menginformasikan habitus bersama (*shared habitus*) yang beroperasi ke dalam arena (*field*). *Doxa* dalam hal ini merupakan hasil dari penaklukan melalui pernyataan performatif dan normatif yang sering diekspresikan dan direpresentasikan melalui elemen-elemen yang berpengaruh di dalam Ranah, yang menempatkan arena sebagai dunia

dengan aturan dan hukumnya sendiri (*nomos*), bentuk-bentuk diskursif (*logos*), kepercayaan normative (*illusion*), kondisi sosial historis (*epoche*), tindakan dan perilaku yang diharapkan dan tantangan-tantangannya.

Konsep *doxa* sebagai kepercayaan bersama yang tidak dipertanyakan lagi membentuk sebuah arena, mendasari gagasan yang menghubungkan pada kekuasaan simbolik, secara khusus relevan dengan pemahaman relasi sosial dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, *doxa* mengambil bentuknya sebagai kekuasaan simbolik yang memediasi berbagai bentuk akumulasi modal (budaya, ekonomi, sosial). Kekuasaan ini dijalankan melalui kebiasaan, mekanisme, perbedaan dan asumsi-asumsi, kekuatan dan legitimasinya berada di dalam kesalah-pengenalan (*misrecognition*) atas karakter kemunculan dan reproduksi sosial historis yang sewenang-wenang.

Kekuasaan simbolik berasal dari institusi-institusi yang dikenal bersamaan dengan relasi sosial yang terinstitusionalisasi (pendidikan, agama, seni) yang memiliki kekuasaan untuk membangun kategori dan mengalokasikan nilai berbeda di dalam simbol dan yang melegitimasi diri mereka sendiri lebih lanjut dalam proses. *Doxa* dalam hal ini merupakan bentuk kekuasaan simbolik.

Sebagaimana ruang sosial yang selalu bergerak, di dalam *doxa* terdapat pertarungan dunia wacana (*universe of discourse*) antara *heterodoxy* dan *orthodoxy*. *Heterodoxy* adalah opini (wacana) yang berusaha memberikan penilaian negatif terhadap *doxa*, sedangkan *orthodoxy* adalah wacana yang terus berusaha mempertahankan (semakin membenarkan) *doxa* (Bourdieu, 1995:168-169).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif Metode kualitatif sebagaimana penjelasan Creswell didefinisikan sebagai berikut:

“Qualitative research focuses on the process that is occurring as well as the product or outcome. Researchers are particularly interested in understanding how things occurs”. John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and*

Quantitative Approaches (California: SAGE Publications, Inc, 1994), hal. 162.

Definisi oleh Cresswell di atas, menerangkan bahwa penelitian kualitatif difokuskan pada proses yang terjadi dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif tidak dapat dibatasi. Disamping itu, peneliti merupakan bagian yang penting dalam penelitian untuk memahami gejala sosial terjadi dalam proses penelitian.

Penelitian kualitatif, selalu mengandaikan adanya suatu kegiatan proses berpikir induktif untuk memahami suatu realitas, peneliti yang terlibat langsung dalam situasi dan latar belakang fenomena yang diteliti serta memusatkan perhatian pada suatu peristiwa kehidupan sesuai dengan konteks penelitian.

secara epistemologis, penelitian kualitatif didasarkan pada nilai dan judgment nilai, bukan fakta. Dalam pandangan umum di lapangan mereka mengklaim bahwa nilai peneliti memandu dan membentuk simpulan penelitian sebab peneliti membangun realitas dari penelitian, peneliti memiliki sensitifitas pada realitas yang diciptakan oleh orang lain yang terlibat, dan konsekuensi perubahannya dan perbedaan-perbedaan nilai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigm konstruktivisme sebagai paradigma metode penelitian. Mengacu pada Guba dan Lincoln dalam *Naturalistic Inquiry* (1985: 70-91) menyebutkan empat macam paradigma yaitu, positivisme, post positivisme, konstruktivisme dan kritis.

secara metodologi, penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus sebagai cara melaksanakan prosedur untuk membedah persoalan yang menjadi fokus penelitian itu sendiri yang mencakup proses, prinsip, dan prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian.

Pemilihan studi kasus, sebagai metodologi karena peneliti sedang melakukan interpretasi atas suatu kasus, termasuk mengkonstruksi kembali kasus tersebut sesuai dengan tahapan dan prosedur yang digunakan dalam pendekatan studi kasus.

PILKADA MAKASSAR SEBAGAI ARENA PERTARUNGAN SIMBOL IDENTITAS

22 Juli 2013, untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia, pemilihan walikota diikuti oleh sepuluh pasang kontestan. Gejala di mana kekuasaan terasa begitu penting bagi banyak kalangan, sekaligus indikasi pilwali Makassar adalah sebuah arena perangnya sarat kepentingan gerbong dan perebutan kekuasaan.

Dalam sejarah politik Kota Makassar dan mungkin kota-kota lain di Indonesia Timur, untuk pertama kalinya sebuah hajatan pemilihan walikota di ikuti sampai dengan sepuluh pasangan kandidat. Sebuah fenomena yang tak biasa, yang menggambarkan bahwa kekuasaan atas Kota Makassar adalah sebuah arena yang menarik, sekaligus sarat akan kepentingan.

Meminjam padangan Bourdieu, maka jika dianalisis ada dua daya tarik besar di balik kemunculan puluhan orang dalam arena pertarungan pemilihan walikota makassar. Pertama, ajang pemilihan walikota Makassar dipandang sebagai sarana sirkulasi elite yang memungkinkan bagi hadirnya peluang untuk melakukan transformasi kepemimpinan baru diluar kelompok dominan yang selama ini berkuasa. Apalagi dengan tidak hadirnya kandidat walikota petahana Ilham Arief Sirajuddin yang sudah dua periode menjabat walikota merupakan 'arena terbuka' bagi munculnya para penguasa baru di luar individu dan kelompok tersebut.

Kedua, konfrontasi yang terjadi dengan melibatkan beragam representasi kepentingan individu dan wakil kelompok sebenarnya merupakan bukti bahwa jabatan walikota dan wakil walikota masih dipandang sebagai sebuah 'arena penting' yang memiliki daya tarik 'kapital simbolik' yang besar bagi banyak kalangan.

Hadirnya sirkulasi pergantian elite secara regular dalam sistem demokrasi langsung melalui pemilihan walikota secara priodik lima tahunan, tidak dapat disangkal telah membuka ruang kesempatan yang sama bagi banyak orang untuk melakukan usaha pencapaian 'akumulasi prestise'

Berdasar fakta di atas, maka wajar setiap pemilihan walikota Makassar senantiasa menjadi sebuah ajang yang begitu ramai, mampu menarik sejumlah elit politik baik lokal maupun nasional yang memiliki relasi dengan kota Makassar, untuk ikut serta dalam pusaran politik pemilihan walikota Makassar baik sekedar menjadi

pendukung atau bahkan mengusung klan atau meminjamkan modal Simbolik Mereka.

Seperti yang terekam pada pemilihan walikota Makassar 2013 yang lalu, di mana tokoh nasional sekelas Jusuf Kalla atau Anis Matta yang kala itu masih menjadi Presiden PKS, ikut terbawa dalam pusaran perebutan kursi walikota Makassar sebagaimana yang terekam pada iklan Harian lokal Fajar 8 September dan Harian Tribun Timur 15 Agustus 2013 yang lalu.

Meminjam pandangan Bourdieu, kehadiran tokoh nasional merupakan ajang akumulasi modal simbolik (*symbolic capital*), yang wujudnya berupa relasi yang menentukan disposisi seseorang dan kemenangannya tergantung pada seberapa besar modal-modal yang dimiliki. Modal-modal tersebut bisa di konversi satu sama lain menjadi modal simbolik. Pada titik ini, kepemilikan modal yang lebih akan menguasai atau mendominasi sebuah arena.

Akumulasi modal simbolik ini mencoba ditampilkan dengan kehadiran beberapa tokoh nasional asal Sulawesi Selatan yang lain. Selanjutnya, secara terang-terangan turun gunung menjadi calon atau mengusung bagian dari klan politik mereka untuk ikut berlaga dalam arena pilkada kota Makassar.

PERANG SIMBOL ETNIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR

Pada 4 September 2013, satu pekan setelah penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar, dua media cetak terbesar di Makassar, Harian Fajar dan Harian Tribun Timur, memuat iklan '100% Makassar dan asli lokal' yang dibuat oleh pasangan Irman-Busrah langsung menunjukkan penonjolan politik identitas etnik.

Kalimat '100 % Makassar', merupakan mekanisme dominasi simbolik sesuai pemikiran Bourdieu tentang *doxa*. Secara singkat, *doxa* adalah pandangan penguasa yang dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak lagi memiliki sikap kritis pada pandangan penguasa. Pandangan penguasa itu biasanya bersifat sloganistik, sederhana, populer, dan amat mudah dicerna oleh rakyat banyak, walaupun secara konseptual, pandangan tersebut mengandung banyak kesesatan.

Iklan yang dibuat oleh pasangan Irman Yassin Limpo dan Busrah Abudullah atau dikenal dengan sebutan Noah (None-Busrah), sekaligus memetakan tokoh / pasangan calon yang akan maju. Mana yang orang asli Bugis-Makassar dan mana yang bukan.

Doxa menunjukkan, bagaimana Etnisitas bisa meraih, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaan. Dengan mempermainkan simbol yang dapat memasuki pikiran yang dikuasai, sehingga pemilih "Ortodoks" dapat menentukan pilihan dengan tepat. Warga dapat melihat dirinya sama dengan Irman Yassin Limpo yang lahir dan besar di Makassar. Irman sedang memainkan simbol etnisitas kepada warga Makassar yang hidup dalam hegemoni, 'siapa putra daerah dan siapa yang bukan putra daerah'.

Penegasan lain kehadiran politik identitas etnik kembali terlihat lewat iklan politik yang muncul di Harian Tribun Timur pada 10 September 2013. Iklan ini menggambarkan seseorang yang berbaju orange yang sedang berada di pintu keberangkatan dengan tulisan di layar pemberitahuan penerbangan Gorontalo.

Lewat gambaran simbolik warna orange yang menjadi simbol dari kandidat Ramdhan Pomanto-Samsurizal dan tulisan 'DIA', serta layar pemberitahuan yang bertuliskan Gorontalo, semakin jelaslah siapa yang menjadi target dari kuasa kemunculan politik identitas etnik tersebut.

Dialog dalam iklan tersebut, dengan penggunaan bahasa dan dialek asli Makassar di Bandara Sultan Hasanuddin, menegaskan apa yang dikatakan Bourdieu, Bahasa bukanlah medium transparan yang secara netral menggambarkan realitas. Meski sering diabaikan, sebenarnya bahasa berkait erat dengan kekuasaan. Hubungan keduanya dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, dari yang paling kasar dan kentara seperti pelarangan bahasa tertentu hingga yang paling halus seperti penciptaan realitas melalui bahasa. Dan justru bentuk yang terakhir inilah yang paling efektif dan stabil karena tidak dikenali sebagai kekuasaan.

Di titik ini pemikiran Pierre Bourdieu mengenai hubungan bahasa dan kuasa simbolik menjadi relevan untuk dibicarakan. Garis penentuan batas tersebut dibuat untuk tidak

dapat dirubah, maka status sebagai anggota dan bukan anggota, dengan serta merta tampak bersifat permanen. Penggunaan simbol dan bahasa adalah cara kuasa untuk menunjukkan oposisional etnik, “Kami Makassar dan DIA orang Gorontalo”.

KOMUNIKASI POLITIK RAMDHAN POMANTO

Pierre Bourdieu, dalam *The Forms of Capital* (1986), menyebut fenomena sosio kultur sebagai pengukuhan terhadap modal. Bourdieu memetakan modal dalam empat bentuk: ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Dalam kerangka Bourdieu, modal budaya adalah syarat yang cukup kokoh untuk mengakumulasi modal yang lain. Sebab modal budaya merupakan hasil dari proses akumulasi yang panjang dan memiliki konsekuensi historis yang sulit dihindari.

Modal Sosial Budaya kerap menjadi modal awal bakal calon untuk maju dalam arena pilkada. Sembilan dari sepuluh calon walikota Makassar memiliki modal cultural yang menjadi identitas warga Kota. Lalu bagaimana dengan Ramdhan Pomanto yang secara patriarki berasal dari luar Makassar? Jawabannya menurut Bourdieu adalah “Negosiasi Identitas”. Maka yang perlu diupayakan dalam skema negosiasi modal-modal, bukan lagi loyalitas, melainkan “koneksitas”.

Logika “koneksitas” berbasis persamaan identitas, dengan demikian, tidak mengandung represi simbolik dari modal satu ke modal yang lain, melainkan justru mempermudah apa yang disebut Bourdieu sebagai “konversi” di antara modal-modal—jika itu yang hendak diupayakan. Pada titik ini, modal-modal berada dalam situasi setara. Prinsip diferensiasi di antara modal-modal semakin nampak. Sementara prinsip independensi di dalam ranahnya masing-masing, semakin kukuh.

Melalui tagline sebagai Ana’ Lorongna Makassar, Ramdhan Pomanto ingin membangun koneksitas antar modal kultural. Ia adalah sosok yang lahir, besar, dan berumah di lorong – lorong Kota Makassar. Itulah nilai historis awal yang ingin dinegosiasikan oleh seorang Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Dani Pomanto (DP) ketika merumuskan sendiri konsep *branding campaign* dirinya.

MAKASSAR ‘KOTA DUNIA’, INTERAKSI SIMBOLIK SEBAGAI HETERODOXA

Penggunaan ikon “Makassar Kota Dunia” adalah hal yang mampu membangun identitas yang lebih besar dibandingkan politik identitas etnik berbasis asal usul, sejarah dan kesamaan bahasa seperti propaganda yang dijalankan lawan-lawan politik Ramdhan Pomanto.

Pembacaan yang baik terhadap interaksi sosial kultural atas arena politik kota Makassar dan memunculkan ikon identitas Makassar sebagai kota dunia inilah salah satu elemen kekuatan dari model komunikasi politik yang dimiliki oleh Ramdhan Pomanto. Ia menggugat Makassar sebagai bangsa yang terbuka.

Mempertanyakan doxa menjelang pilkada merupakan momen yang tepat. ketika simetri antara habitus dan suatu ranah terguncang, ketika warga sedang “gaduh” memilih pemimpin baru. Guncangan di ruang sosial menimbulkan gema di ruang simbolik, dan pada gilirannya memicu terbentuknya ruang opini di mana berbagai anggapan dan keyakinan yang sebelumnya diterima saja tanpa pernah dibicarakan mulai diperdebatkan secara eksplisit dalam wacana politik. Dalam ruang opini inilah Ramdhan Pomanto hendak mengubah struktur suatu ranah. memproduksi heterodoxy, yaitu pernyataan eksplisit yang mempertanyakan Keabsahan skema persepsi dan apresiasi yang tengah dikedepankan pasangan lain melalui tagline 100% Makassar.

DUKUNGAN Ilham Arief Sirajuddin, RE-DOMINASI SIMBOLIK

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa pertarungan Politik dalam arena Pilkada Kota Makassar merupakan pertarungan antar klan politik di Sulawesi Selatan. ketidak hadiran calon Incumbent dalam Arena Politik menjadikan Pilkada ini menjadi pertarungan “bebas”. Ilham Arief Sirajuddin sebagai Walikota saat itu telah memenuhi kuota kepemimpinannya selama dua periode.

Ruang kosong Dominasi Politik ini dimanfaatkan sebagai momentum terbaik meraih kekuasaan di pintu utama Indonesia Timur. Maka tak kurang dari 10 pasang calon maju untuk mengisi kertas suara KPU. Keyakinan ini wajar mengingat diberbagai ajang Pilkada,

pasangan petahana merupakan selalu memiliki modal besar untuk memenangkan Pilkada. Apalagi bagi warga Makassar, Ilham Arief merupakan sosok pemimpin ideal bagi warga.

Meminjam pandangan Bourdieu, maka jika dianalisis ada dua daya tarik besar di balik kemunculan puluhan orang dalam arena pertarungan pemilihan walikota makassar. **Pertama**, ajang pemilihan walikota Makassar dipandang sebagai sarana sirkulasi elite yang memungkinkan bagi hadirnya peluang untuk melakukan transformasi kepemimpinan baru diluar kelompok dominan yang selama ini berkuasa. Apalagi dengan tidak hadirnya kandidat walikota petahana Ilham Arief Sirajuddin yang sudah dua periode menjabat walikota merupakan ‘arena terbuka’ bagi munculnya para penguasa baru (pervernus) di luar individu dan kelompok

Kedua, konfrontasi yang terjadi dengan melibatkan beragam representasi kepentingan individu dan wakil kelompok sebenarnya merupakan bukti bahwa jabatan walikota dan wakil walikota masih dipandang sebagai sebuah ‘arena penting’ yang memiliki daya tarik ‘kapital simbolik’ yang besar bagi banyak kalangantersebut.

Ilham Arief dianggap sebagai pemimpin paling berhasil dalam membangun peradaban kota Makassar. Dalam berbagai Catatan penelitian, penulis mendapatkan fakta bahwa warga Makassar masih menginginkan Ilham Arief melanjutkan kepemimpinan. Sayangnya Undang-undang mengatur bahwa masa jabatan politik seseorang hanya boleh berlangsung selama dua periode kepemimpinan.

Fakta ini menunjukkan bahwa sosok Ilham Arief masih memiliki modal politik yang sangat kuat. Loyalis Ilham Arief tersebar luas di 14 Kecamatan Kota Makassar. Modal inilah yang selanjutnya menjadi penentu keberhasilan Ramdhan Pomanto dalam Pilkada Kota.

Awal kemunculan Ramdhan Pomanto tidak banyak menjadi pembicaraan publik sampai ini tercermin dari popularitas pasangan ini yang tidak terlalu banyak menonjol pada survei politik yang dilakukan IDEC bulan April di mana popularitas personal Danny baru berada pada angka 3,57% demikian pula Syamsu Rizal 0,77 % dari 37 calon walikota dan wakil walikota yang disurvei.

Modal simbolik Ilham Arief Sirajuddin sebagai Walikota Makassar dan ketua partai Demokrat Sulawesi Selatan dialihkan menuju kekuasaan formal yang merupakan bagian struktur yang kuat mampu memberi peran terhadap seorang aktor yang ingin menguatkan posisinya sebagai penguasa yang akan datang. dalam hal ini dukungannya terhadap Ramdhan Pomanto.

Dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai Walikota, Ilham Arief Sirajuddin selain menggunakan mesin partai dalam dukungannya, juga menggunakan kekuatan birokrasi sebagai kekuatan politik mulai dari camat hingga RT/RW. Ramdhan Pomanto membentuk jaringan politik yaitu komunitas Ana’ Lorongna Makassar yang dibentuk mulai dari lorong-lorong perumahan. Sedangkan Ilham Arief Sirajuddin menggunakan jaringan politiknya sudah sudah terbentuk yaitu Batu Putih Syndicate dan pengaruhnya sebagai ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan serta sebagai Walikota Makassar yang masih menjabat.

Menggunakan pandangan Bourdieu, dominasi Birokrasi, mesin partai serta ketokohan agen politik menjadi modal besar dalam mengarungi arena Politik. Akumulasi modal simbolik yang masih dominan di tangan Ilham diserahkan penuh kepada Ramdhan Pomanto yang juga merupakan penasehat dan konsultan pembangunan Ilham selama menjabat sebagai Walikota. Mobilisasi dominasi simbolik yang dimiliki oleh Ilham Arief Sirajuddin ditampilkan di berbagai saluran media sehingga mampu mempengaruhi baik fisik maupun psikologis warga Makassar dan memenangkan Ramdhan Pomanto sebagai walikota Makassar ke-27.

KESIMPULAN

Politik identitas etnik ditampilkan dalam wujud “Komunikasi Politik propaganda etnik” dengan pembangunan status oposisional “kami 100% asli makassar dan DIA bukan makassar”. Konstruksi identitas etnik dilakukan melalui berbagai sarana media baik media cetak melalui (iklan politik), organisasi kekerabatan etnik, serta melalui black campaign dengan menggunakan selebaran gelap berupa liflet, maupun melalui media sosial dengan beragam akun buzzer anonim untuk menyerang latar

belakang identitas etnik Ramdhan Pomanto sebagai orang luar.

Politik identitas etnik ini digunakan pada arena pemilihan kepala daerah, sebagai bentuk privileg orang dalam yang harus diterima dan menjadi konsekuensi primordialis (Ortodoxa) yang harus diterima oleh mereka yang dikonstruksi sebagai orang luar. Konstruksi oposisional status identitas etnik, juga menjadi garis batas segregasi interaksi simbolik, siapa yang boleh menjadi pemimpin dan siapa yang harus ditolak.

Ramdhan Pomanto membangun model komunikasi politik berbasis “Koneksitas Modal Simbolik” dengan menyentuh ruang sosio kultural dan emosional pemilih, melalui politik bahasa “Ana’ Lorongna Makassar. Bahasa ‘Ana’ Lorongna Makassar, adalah konstruksi ‘Negosiasi Identitas’ yang di jalankan oleh Ramdhan Pomanto untuk menghadapi stigma, labellisasi, dan *stereotype* sebagai orang di luar kelompok (out-group) yang berusaha menolaknya dari arena kompetisi pemilihan walikota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2014. *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi – ed. Revisi -* : Rajawali Pers, Jakarta
- Fiske, John. 2004. *Cultural and Communication Studies*, sebuah pengantar Paling Komprehensif. Yogyakarta : Jalasutra
- Foucault, Michel 1995. *The Order of Thing : Arkeologi Ilmu-Ilmu Kemanusiaan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Giorgio Agamben, 1995. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, Stanford University Press, California.
- Haboddin, Muhtar 2012. *Menguatnya politik identitas dalam ranah lokal*, Universitas Brawijaya.
- Harker, Richard. 2005. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bordieu*. Yogyakarta, Jalasutra.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The clash of civilizations and the remaking of world order*, New York, Simon & Schuster.
- K. Yin, Robert 2006. *Studi kasus desain & metode*; Rajawali Pers, Jakarta.
- Little John, Stephen W & Karen A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi (theories of human communication)* edisi 9. Jkt. Salemba Humanika.
- Meyer, Thomas, 2004. *Politik Identitas: Tantangan Terhadap Fundamentalisme Moderen*. Jakarta: Friedrich-Eben-Stiftung dan Pemuda Muhammadiyah.
- Mulyana, Deddy 2002. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
- *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, 2010, Rosdakarya, Bandung.
- Mujahidin, Fahmid 2002. *Identitas dan kekuasaan ; Hibriditas kuasa uang dan makna dalam Etnis Bugis- Makassar. ininawa-Ispei, Makassar.*
- Nimmo, Dan . 2004. *Komunikasi Politik , Khalayak dan Efek*. Jakarta : Rosda Karya.
- Maarif, Ahmad Syafii 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Cet I*, Jakarta: Paramadina
- McQuail, Dennis. 1987. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga. McQuail, Dennis and